



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)



INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025



Jalan Fisabilillah Nomor 1 Pasir Peti

inspektorkabkepanambas@gmail.com



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahhiim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana sub kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan dan pengawasan pada Tahun Anggaran 2025 serta pedoman dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua stakeholder dan/atau pihak pemangku kepentingan.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Tarempa, 31 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,



YUNIZAR, SE.,M.P

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19700623 199803 1 009

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistimatika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	31
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	41
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1	Capaian Persentase (%) Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2023..... 12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas s/d Tahun 2025 17
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Renstra 28
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas 29
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 33
Tabel 2.6	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 ... 40
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Renstra 44
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Serta penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Proses penyusunan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh stakeholder dan/atau pemangku kepentingan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang setelah dilaksanakan forum OPD oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
17. Surat Sekretariat Daerah Nomor : B/000.7.2.4/30/BAPPEDA/SD/1/2024 Perihal Permintaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta sasaran yang ingin di capai pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yaitu:

1. Sebagai pedoman atau dasar penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan yang akan diusulkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai dasar suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan pada Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai bahan evaluasi program/kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta
4. Sebagai dasar pengukuran dan penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga mudah melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dari target yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini, memuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebelum diterbitkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 serta turunannya berupa Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sistematika penyajian Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Inspektoarat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 diuraikan secara singkat dalam masing–masing bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

Evaluasi realisasi capaian target diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai Renstra yang telah ditetapkan, untuk dapat mengetahui program/kegiatan dan sub kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari program/kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, agar program kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bisa terakomodir pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 serta pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 sehingga tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Lampiran I Surat Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas **Nomor : B/000.7.2.4/30/BAPPEDA/SD/1/2024 tanggal 31 Januari 2024** tentang Alokasi Plafon Anggaran Sementara Ranwal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di alokasikan sebesar **Rp. 21.628.867.075 (Dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh lima Rupiah)** dimana alokasi anggaran tersebut sudah termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji pegawai tidak tetap (PTT). Adapun alokasi anggaran tersebut sangat diharapkan dapat disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada perangkat daerah dan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk lebih baik.

Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 13.628.867.075 (Tiga belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh lima Rupiah). Alokasi anggaran tersebut bertambah sebesar Rp. 8.000.000.000 (Delapan milyar Rupiah) dan/atau bertambah sebesar 63,01% dibandingkan dari Alokasi Plafon Anggaran Sementara Ranwal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Seluruh program dan kegiatan yang tertera dalam Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 sejalan dan mendukung program kegiatan yang akan di capai oleh Kepala Daerah. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 telah disesuaikan dengan program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari 3 (Tiga) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub Kegiatan yaitu terdiri dari :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan Ini terdiri dari 5 (lima) Sub kegiatan :
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - d. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

- 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pengawasan Desa;
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan;

- Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan;
2. Pendampingan Dan Asistensi
- Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dan capaian rencana strategi (Renstra) Inspektorat Daerah yang dapat tercapai, dengan pagu anggaran APBD murni sebesar Rp. 13.659.252.069,- dan Perubahan APBD menjadi Rp. 13.467.645.819,- atau berkurang sebesar Rp. 191.606.250,- atau (1,42%). Adapun realisasi anggaran keuangan pada Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 86,81%, sedangkan realisasi fisik mencapai 93,99% sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Capaian Persentase (%) Realisasi Keuangan Dan Fisik Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	Realisasi Anggaran		
			Rp.	Keu %	Fisik %
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.214.386.078,00	10.232.401.769,00	86,81	93,99
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.465.000,00	36.632.500,00	0,28	0,30
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	62.475.000,00	36.392.500,00	0,28	0,29
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	1.990.000,00	240.000,00	0,00	0,01
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.527.308.224,00	7.752.024.812,00	57,56	62,38
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (INSPEKTORAT DAERAH)	8.366.429.224,00	7.595.864.312,00	56,40	61,20
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (INSPEKTORAT DAERAH)	141.480.000,00	139.080.000,00	1,03	1,05

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	Realisasi Anggaran		
			Rp.	Keu %	Fisik %
1	2	3	4	5	6
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (INSPEKTORAT DAERAH)	19.399.000,00	17.080.500,00	0,13	0,13
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.000.000,00	37.200.000,00	0,28	0,36
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (INSPEKTORAT DAERAH)	48.000.000,00	37.200.000,00	0,28	0,36
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246.090.569,00	204.608.491,00	1,52	1,62
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (INSPEKTORAT DAERAH)	56.363.935,00	44.863.964,00	0,33	0,42
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (INSPEKTORAT DAERAH)	189.726.634,00	159.744.527,00	1,19	1,20
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.422.818,00	610.457.005,00	4,53	4,82
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	2.493.800,00	2.493.800,00	0,02	0,02
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	140.596.668,00	122.063.100,00	0,91	1,04
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (INSPEKTORAT DAERAH)	3.491.800,00	3.186.600,00	0,02	0,03
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	3.997.200,00	3.997.200,00	0,03	0,03
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (INSPEKTORAT DAERAH)	27.410.350,00	18.647.200,00	0,14	0,20
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu (INSPEKTORAT DAERAH)	30.655.000,00	20.237.200,00	0,15	0,23
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (INSPEKTORAT DAERAH)	448.778.000,00	439.831.905,00	3,27	3,27
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.322.580.506,00	1.249.090.961,00	9,27	9,67
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (INSPEKTORAT DAERAH)	2.190.000,00	1.139.000,00	0,01	0,01
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (INSPEKTORAT DAERAH)	59.247.650,00	39.738.478,00	0,30	0,30
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	4.036.400,00	4.036.400,00	0,03	0,03
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (INSPEKTORAT DAERAH)	1.257.106.456,00	1.204.177.083,00	8,94	9,33

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	Realisasi Anggaran		
			Rp.	Keu %	Fisik %
1	2	3	4	5	6
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.518.961,00	342.388.000,00	2,54	2,59
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (INSPEKTORAT DAERAH)	9.150.090,00	4.837.200,00	0,04	0,07
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (INSPEKTORAT DAERAH)	33.280.000,00	32.550.800,00	0,24	0,25
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (INSPEKTORAT DAERAH)	306.088.871,00	305.000.000,00	2,26	2,27
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.374.529.613,00	809.060.524,00	5,97	7,04
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.106.933.113,00	743.567.826,00	5,44	6,35
23	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	63.056.500,00	5.610.000,00	0,04	0,07
24	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	153.948.809,00	88.075.739,00	0,57	1,15
25	Reviu Laporan Kinerja (INSPEKTORAT DAERAH)	76.336.000,00	28.705.000,00	0,21	0,23
26	Reviu Laporan Keuangan (INSPEKTORAT DAERAH)	96.910.300,00	93.327.047,00	0,69	0,70
27	Pengawasan Desa (INSPEKTORAT DAERAH)	229.775.000,00	127.316.400,00	0,95	1,04
28	Kerjasama Pengawasan Internal (INSPEKTORAT DAERAH)	421.280.504,00	335.947.558,00	2,49	2,68
29	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (INSPEKTORAT DAERAH)	65.626.000,00	64.586.082,00	0,48	0,49
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	267.596.500,00	65.492.698,00	0,53	0,68
30	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (INSPEKTORAT)	18.135.000,00	712.500,00	0,01	0,01
31	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (INSPEKTORAT DAERAH)	249.461.500,00	64.780.198,00	0,52	0,67
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	878.730.128,00	654.956.624,00	4,86	5,22
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	17.898.300,00	6.104.500,00	0,05	0,05
32	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (INSPEKTORAT DAERAH)	17.898.300,00	6.104.500,00	0,05	0,05

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	Realisasi Anggaran		
			Rp.	Keu %	Fisik %
1	2	3	4	5	6
11	Pendampingan dan Asistensi	860.831.828,00	648.852.124,00	4,82	5,17
33	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	119.554.118,00	75.789.388,00	0,56	0,62
34	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (INSPEKTORAT DAERAH)	126.492.000,00	51.405.205,00	0,38	0,55
35	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (INSPEKTORAT DAERAH)	573.109.610,00	500.805.231,00	3,72	3,78
36	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (INSPEKTORAT DAERAH)	41.676.100,00	20.852.300,00	0,15	0,22
Jumlah		13.467.645.819,00	11.696.418.917,00	86,81	93,99

Faktor yang menyebabkan realisasi keuangan tidak tercapai 100% dikarenakan seluruh anggaran yang tidak bisa dicairkan Silpa Anggaran terjadi diakibatkan tidak tersedianya dana di Kas Daerah sehingga tidak dapat mengajukan pencairan keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan yang berakibat kepada beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana dengan maksimal sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.

Implikasi (hasil akhir/kesimpulan) yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah seluruh Program dan Kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya pada Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan dan/atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah melakukan rekrutmen dan/atau penambahan personil PNSD/ASN yang berkompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan sehingga bisa menutupi/mengganti personil lainnya dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga adanya pergantian waktu (*rolling*) antar sesama PNSD/ASN, dan

sewajarnya sudah harus ada kaderisasi mengenai personil pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6					Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6	01				Inspektorat Daerah Daerah									
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.67 % (24 dok)	50.00% (18 Dok)	33.33% (12 Dok)			66,67 (24 Dok)		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	6 Dok	4 Dok			8 Dok		
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80%	60%	40%			80,00		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	41 Orang	37 Orang			45 Orang		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dok	15 Dok	10 Dok			20 Dok		
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	80%	60%	40%			80,00		
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	01	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80%	60%	40%			80,00		
6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80%	60%	40%			4 Unit		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	132 Stell	90 Stell	75Stell			4 Paket		
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	3 Dok	2 Dok			4 Dok		
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 Orang	78 Orang	52 Orang			104 Orang		
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	60%	40%			80,00		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistic Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4Paket	3 Paket			5 Paket		
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	01	2.07		Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	60%	40%			80,00		
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Paket					12 Paket		
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	17 Unit	16 Unit			18 Unit		
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	60%	40%			80.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Lap	36 Lap	24 Lap			48 Lap		
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	36 Lap	24 Lap			48 Lap		
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Lap	36 Lap	24 Lap			48 Lap		
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Lap	36 Lap	24 Lap			48 Lap		
6	01	01	2.09		Pemeliharaana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	60%	40%			80,00		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	17 Unit	15 Unit			20 Unit		
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15 Unit	15 Unit			18 Unt		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung			0		
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung			4		
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.75% (21 OPD)	51,62% 16 OPD	35,49% (11 OPD)			67,75% (21 OPD)		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	80%	60%	40%			80,00		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	63 Lap	42 Lap	21 Lap			63 Lap		
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Lap	21 Lap	19Lap			23 Lap		
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	48 Lap	24 Lap	12 Lap			24 Lap		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kinerja								
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Lap	3 Lap	2 Lap			4 Lap		
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	21 Lap	18 Lap	16 Lap			20 Lap		
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawas Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Lap	2 Lap	1 Lap			3 Lap		
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16 Lap	12 Lap	8 Lap			16 Dok		
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80%	60%	40%			80,00		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8 Lap	6 Lap	4 Lap			8 Lap		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Lap	4 Lap	5 Lap			3 Lap		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPI NGAN DAN ASISTENSI	Persentase (%) Perangkat Daerah	61,29%	41,94%	25,81%			61,29% (19 OPD)		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						yang Sudah di Nilai SPIP	19 OPD	13 OPD	8 OPD					
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	80%	60%	40%			80		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	63 PD	43 PD	23 PD			40 PD		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Pendampingan Dan Asistensi	80%	60%	40%			80,00		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	58 PD	48 PD	38 PD			78 PD		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	83 PD	62 PD	41 PD			83 PD		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64 LHP	48 LHP	32 LHP			64 LHP		
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	28 PD	21 PD	14 PD			28 PD		

Catatan: Untuk Target Renja dan Realisasi Renja Tahun 2020 tidak kita tampilkan karena masih memakai Permendagri 13 Tahun 2006, sedangkan untuk Program dan Kegiatan 2021 menggunakan Permandagri 90 Tahun 2019

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Dokumen Rancangan Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan target perangkat daerah. Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Berikut disampaikan target indikator yang telah disusun, hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2025	2023	2025	2025	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengawasan		Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	58,00%	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kualitas Pengawasan	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	CC (55,00)	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah	B (66,00)	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Renstra tertuang sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Lalu		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025 (Tahun n-2)	2023 (Tahun n-1)	2024 (Tahun n)	2025 (Tahun n+1)	2026 (Tahun n+2)	2025 (Tahun n-2)	2023 (Tahun n-1)	2025 (Tahun n)	2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	-	-	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%	66,17%	63,80%	66,00%	66,00%	
3	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	-	-	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	86,67%	83,80%	90,00%	90,00%	
4	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	
5	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah Daerah	-	-	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)	B (64,29)	B (64,29)	BB (80,00)	BB (80,00)	
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Daerah	-	-	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)	BB (78,02)	BB (78,02)	AA (86,00)	AA (86,00)	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi yaitu :

a. Faktor Pendorong

- Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 73 Tahun 2019, sehingga diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- Mekanisme Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Adanya kerjasama yang baik antar perangkat daerah dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan, serta komitmen bersama pemangku kepentingan dalam bersama-sama mendukung peningkatan Kabupaten Anambas untuk lebih baik dalam segala bidang;
- Dukungan alokasi anggaran yang baik dan layak merupakan salah satu faktor yang mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan;
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang sudah mulai dilaksanakan dengan baik, dan
- Adanya SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor Penghambat

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Objek lainnya yang diperiksa;
- Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum mengoptimalkan SAKIP;
- Dan masih terdapat Pemerintah Desa yang lambat dan tidak mengerti dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan, dan terdapat perangkat desa yang belum bisa untuk menyelesaikan rekomendasi temuan atas pimpinan perangkat desa sebelumnya;
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan, dan

- Belum optimalnya dukungan anggaran dalam rangka peningkatan Kapabilitas & Kinerja Inspektorat Daerah.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat terlepas dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang dapat dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan dapat diuraikan pada program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut:

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Inspektorat Daerah membuka ruangan dan *Help Desk* untuk konsultansi dalam pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dan berpengalaman pada Bidang yang dimiliki.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah masih kurangnya tenaga terampil dalam bidang pemeriksaan dan pengawasan (PNSD/ASN), serta fasilitas pendukung lainnya antara lain alat bantu dalam bekerja dan sarana prasarana gedung kantor yang kurang kondusif dalam bekerja.

Hampir semua program kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melibatkan Auditor Perempuan dan Auditor Laki-laki karena perlakuan dalam melaksanakan tugas dipandang sama dalam penugasan, sebagian penugasan yang di tugaskan dan/atau diperintahkan di Ketua oleh Auditor

Perempuan maupun sebaliknya, Inspektorat Daerah tidak ada membedakan persamaan gender dalam bekerja.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu diharapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)/Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat diikutsertakan pada setiap Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi yang dipegang di luar maupun di dalam Daerah, agar menambah wawasan dan pengetahuan, disamping berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam diri sendiri.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambaran identifikasi kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kep. Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	17.902.957.313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kep. Anambas	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	17.902.957.313	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83,33 (30 Dok)	182.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83,33 (30 Dok)	182.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	150.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	5.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	5.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	5.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	2.500.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	10.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	9.975.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	9.975.000.000	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	9.625.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	9.625.000.000	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dok	200.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dok	200.000.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	150.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00	65.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00	65.000.000	
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Lap	65.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Lap	65.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	835.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	835.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	150.000.000	
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok	135.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok	135.000.000	
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	550.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	550.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	2.767.957.465	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	2.767.957.465	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.000.000	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.592.957.465	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.592.957.465	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	35.000.000	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.000.000	
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	300.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	300.000.000	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	700.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	700.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	1.865.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	1.865.000.000	
21	Pengadaan Mebel	Kep. Anambas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Paket	275.000.000	Pengadaan Mebel	Kep. Anambas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Paket	275.000.000	
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	330.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	330.000.000	
23	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	19 Unit	330.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	19 Unit	330.000.000	
24	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.272.499.848	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.272.499.848	
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	330.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	330.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.590.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.590.000.000	
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lap	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lap	20.000.000	
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Lap	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Lap	50.000.000	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap	1.450.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap	1.450.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	550.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	550.000.000	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	40.000.000	
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	70.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	70.000.000	
32	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	40.000.000	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kep. Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	400.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan	83,87% (26 OPD)	2.282.500.152	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan	83,87% (26 OPD)	2.282.500.152	12,90
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00	1.697.500.152	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kep. Anambas	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00	1.697.500.152	
34	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Lap	175.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Lap	175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Lap	185.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Lap	185.000.000	
36	Reviu Laporan Kinerja	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Lap	200.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Lap	200.000.000	
37	Reviu Laporan Keuangan	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Lap	150.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Lap	150.000.000	
38	Pengawasan Desa	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Lap	350.000.000	Pengawasan Desa	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Lap	350.000.000	
39	Kerja Sama Pengawas Internal	Kep. Anambas	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Lap	354.000.000	Kerja Sama Pengawas Internal	Kep. Anambas	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Lap	354.000.000	
40	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dok	283.500.152	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa	Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dok	283.500.152	
10	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00	585.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00	585.000.000	
41	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Lap	235.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Lap	235.000.000	
42	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Lap	350.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Lap	350.000.000	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kep. Anambas	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP	80,65% (25 OPD)	1.443.409.610	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kep. Anambas	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP	80,65% (25 OPD)	1.443.409.610	
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100,00	260.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100,00	260.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kep. Anambas	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	83 PD	120.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kep. Anambas	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	83 PD	120.000.000	
44	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kep. Anambas	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	60 PD	140.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kep. Anambas	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	60 PD	140.000.000	
12	Pendampingan Dan Asistensi	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi	100,00	1.183.409.610	Pendampingan Dan Asistensi	Kep. Anambas	Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi	100,00	1.183.409.610	
45	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	98 PD	185.300.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	98 PD	185.300.000	
46	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	99 PD	175.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	99 PD	175.000.000	
47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kep. Anambas	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	80 LHP	673.109.610	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kep. Anambas	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	80 LHP	673.109.610	
48	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35 PD	150.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kep. Anambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35 PD	150.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN PROGRAM/KEG/SUBKEGIATAN					21.628.867.075					21.628.867.075	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) disamping sebagai respon usulan para pemangku kepentingan baik dari Legislatif, Eksekutif, Kelompok Masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat haruslah disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya disampaikan kembali kepada OPD yang terkait terhadap Program dan Kegiatan dimaksud, untuk dimuatkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk dibahas kembali bersama Eksekutif dan Legislatif.

Khusus bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Daerah adalah INPRES 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah melaksanakan Kebijakan-kebijakan Nasional mengenai pengawasan, yaitu beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional diantaranya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, PMRB dan lain sebagainya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam rangka meningkatkan intensitas dan kapasitas pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengarusutamaan Gender, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya meningkatkan penguatan kelembagaan yang ditempuh melalui penajaman tugas, fungsi, dan tata kerja sehingga dapat memberi output dan outcome sebagaimana yang diharapkan serta

tidak membedakan kesenjangan antara pegawai perempuan dengan pegawai laki-laki dengan diperlakukan sama dalam lingkungan kerja sebagai pengawas.

Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat Daerah tentu harus memiliki :

1. Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki didasari pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Karakteristik, Potensi, dan Kebutuhan

Karakteristik, potensi yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan secara nyata dan spesifik sehingga dapat dirumuskan fokus substansinya yang menjadi fungsi pengawasan yang harus dilakukan.

3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia didasarkan pada dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama ketersediaan tenaga yang profesional dan menguasai tugas dan fungsi dari pengawasan.

4. Pengembangan Pola Kerja Sama

Pengembangan pola kerja sama didasarkan potensi lingkungan organisasi.

5. Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan Anggaran yang memadai merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan baik lembaga maupun aparatur, mengingat banyaknya obyek yang akan dilakukan pemeriksaan dan pembinaan berada di luar Ibukota Kabupaten, karena selama keberadaan Inspektorat Daerah di tengah-tengah Perangkat Daerah, anggaran yang disediakan belumlah mencapai 1% (satu persen) dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan

6. Pengarustamaan Gender (PUG)

Dalam mendukung program Nasional Pengarustamaan Gender (PUG) yaitu Program Perencanaan Refrondisi Gender (PPRG) pada Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun Anggaran 2021 di implementasikan kedalam program dan beberapa kegiatan secara langsung didalam praktek di lapangan sudah melaksanakan responsif gender dan/atau pengarustamaan gender dengan tidak membedakan kesenjangan antara pegawai laki-laki maupun pegawai perempuan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu dengan menugaskan Auditor Perempuan untuk menjadi Ketua Tim Pemeriksaan (Auditor) untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan di awal tahun.

Program/Kegiatan yang di rumuskan dalam mendukung Pengarustamaan Gender (PUG) yaitu pada program/kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a.Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan memiliki 6 (enam) aspek tersebut diatas, keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut diatas, dapat ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan di bidang pengawasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengalokasikan anggaran pendidikan guna peningkatan kapabilitas dan/kemampuan auditor pengawas intern pemerintah (APIP), serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai agar auditor semangat dalam bekerja, serta sistem aplikasi pengawasan yang handal, serta anggaran yang sangat utama dan juga komitmen dari semua pemangku kepentingan.

Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap profesionalisme pengawasan, yakni indepedensi, integritas dan kompetensi di bidang pengawasan. Permasalahan yang sering timbul di daerah dalam pengawasan adalah perbedaan persepsi antara Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah) dengan Aparat Penegak Hukum tentang kewenangan penanganan atas kasus atau indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi dan perlu adanya kesefahaman dalam bekerja dan pemisahan tugas dan fungsi dari beberapa pihak.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD 2021-2026 yaitu sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan;

- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.
2. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada pada Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD 2021-2026 yaitu sebagai berikut:
- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
- c. Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Secara praktis dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (*mission accomplished*). Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2025	2023	2025	2025	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan		Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	58,00%	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	CC (55,00)	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah	B (66,00)	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, berpedoman pada dokumen Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah terpilih. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anamba Tahun 2025, merupakan Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Kepulauan Anambas Priode 2021-2026, khususnya pada Misi ke 3 (tiga) yaitu Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi. Serta menselaraskan Program dan Kegiatan Nasional yang tertuang dalam SDGs (*Suistanable Development Goals*). Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 50 (Lima puluh) Sub Kegiatan. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pengawasan Desa;
 - f. Kerja Sama Pengawasan Internal;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan;
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
2. Pendampingan Dan Asistensi
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Pada umumnya Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun Anggaran 2025 tidak mempunyai Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu. Program dan Kegiatan yang sudah terrencanakan dan akan dijabarkan pada Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026, yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, kemudian dijabarkan kembali pada Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Total Kebutuhan dana yang dibutuhkan sesuai pagu indikatif yang dirincikan menurut sumber pendanaan adalah sebesar Rp 18.042.000.000 (Delapan belas miliar empat puluh dua juta rupiah) yang diperuntukkan dalam peningkatan sumber daya manusia dan menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pembinaan dan pengawasan. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Di mulai di tahun 1 (pertama) Tahun 2016 sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengakomodir kegiatan yang bersifat pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Khususnya Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, baik Auditor maupun Pejabat Pengawas Pemerintahan serta staf teknis pendukungnya. Karena tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya sebatas Pengawas (*watchdog*), melainkan pembinaan (*assistance*) dan penjamin mutu (*quality insurance*)

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	17.830.457.465	APBD		100%	17.830.457.465
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83,33 (30 Dok)	182.500.000	APBD		83,33 (30 Dok)	182.500.000
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	150.000.000	APBD		10 dok	150.000.000
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	5.000.000	APBD		5 Dok	5.000.000
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	5.000.000	APBD		5 Dok	5.000.000
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	5.000.000	APBD		5 Dok	5.000.000
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	5 Dok	5.000.000	APBD		5 Dok	5.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		SKPD						
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	2.500.000	APBD		5 Lap	2.500.000
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	10.000.000	APBD		5 Lap	10.000.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	9.975.000.000	APBD		100,00	9.975.000.000
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	9.625.000.000	APBD		50 Orang	9.625.000.000
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dok	200.000.000	APBD		25 Dok	200.000.000
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	150.000.000	APBD		5 Lap	150.000.000
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00	65.000.000	APBD		100,00	65.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Lap	65.000.000	APBD		5 Lap	65.000.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	835.000.000	APBD		100,00	835.000.000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	150.000.000	APBD		5 Paket	150.000.000
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok	135.000.000	APBD		5 Dok	135.000.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	550.000.000	APBD		130 Orang	550.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	2.767.957.465	APBD		100,00	2.767.957.465
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.000.000	APBD		6 Paket	30.000.000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.592.957.465	APBD		6 Paket	1.592.957.465

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	35.000.000	APBD		6 Paket	35.000.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.000.000	APBD		6 Paket	35.000.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	75.000.000	APBD		6 Paket	75.000.000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	300.000.000	APBD		5 Lap	300.000.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	700.000.000	APBD		5 Lap	700.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	1.865.000.000	APBD		100,00	1.865.000.000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Paket	275.000.000	APBD		13 Paket	275.000.000
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	330.000.000	APBD		19 Unit	330.000.000
6.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	19 Unit	330.000.000	APBD		19 Unit	330.000.000
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	600.000.000	APBD		1 Unit	600.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	330.000.000	APBD		5 Unit	330.000.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.590.000.000	APBD		100,00	1.590.000.000
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lap	20.000.000	APBD		60 Lap	20.000.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	70.000.000	APBD		60 Lap	70.000.000
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Lap	50.000.000	APBD		60 Lap	50.000.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap	1.450.000.000	APBD		60 Lap	1.450.000.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	550.000.000	APBD		100,00	550.000.000
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	40.000.000	APBD		22 Unit	40.000.000
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	70.000.000	APBD		19 Unit	70.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	40.000.000	APBD		19 Unit	40.000.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	400.000.000	APBD		4 Gedung	400.000.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan	83,87% (26 OPD)	2.355.000.000	APBD		100% (31 OPD)	2.355.000.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00	1.770.000.000	APBD		100,00	1.770.000.000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Lap	175.000.000	APBD		84 Lap	175.000.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Lap	185.000.000	APBD		25 Lap	185.000.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Lap	200.000.000	APBD		30 Lap	200.000.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Lap	150.000.000	APBD		5 Lap	150.000.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Lap	350.000.000	APBD		22 Lap	350.000.000
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawas Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Lap	354.000.000	APBD		4 Lap	354.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dok	356.000.000	APBD		20 Dok	356.000.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00	585.000.000	APBD		100,00	585.000.000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Lap	235.000.000	APBD		10 Lap	235.000.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Lap	350.000.000	APBD		3 Lap	350.000.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP	80,65% (25 OPD)	1.443.409.610	APBD		100% (31 OPD)	1.443.409.610
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksanannya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100,00	260.000.000	APBD		100,00	260.000.000
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	83 PD	120.000.000	APBD		83 PD	120.000.000
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	60 PD	140.000.000	APBD		60 PD	140.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi	100,00	1.183.409.610	APBD		100,00	1.183.409.610
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	98 PD	185.300.000	APBD		98 PD	185.300.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Daerah						
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	99 PD	175.000.000	APBD		99 PD	175.000.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	80 LHP	673.109.610	APBD		80 LHP	673.109.610
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35 PD	150.000.000	APBD		35 PD	150.000.000
JUMLAH KESELURUHAN PROGRAM/KEG/SUBKEGIATAN				21.628.867.075				21.628.867.075

BAB V

P E N U T U P

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 telah di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan terdapat beberapa Sub Kegiatan yang berorientasi Resfonsif Gender dalam konsistensi pada Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada Tahun 2023. Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Apartur Sipil Negara (ASN) dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil dan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya.

Tarempa, 31 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,



YUNIZAR, SE.,M.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009